**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**
2. Sistem pendidikan Islam merupakan usaha pengorganisasian proses kegiatan kependidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Ajaran yang berdasarkan atas pendekatan sistemik sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya terdiri dari berbagai sub-sub sistem dari jenjang pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi yang harus memiliki vertikalitas dalam kualitas keilmuan-pengetahuan dan teknologinya.

Secara historis, adanya lembaga lembaga pendidikan formal dalam bentuk sekolah atau madrasah dalam dunia Islam merupakan pengembangan dari sistem pengajaran dan pendidikan yang telah berlangsung di masjid-masjid, (*kuttab, halaqah, sufah)* sampai kemudian lahir madrasah dan pondok pesantren) yang sejak awal telah berkembang dan dilengkapi sarana-sarana untuk memperlancar pendidikan dan pengajaran.

Sistem pendidikan Islam merupakan suatu cara dalam pemberian dan pengajaran ilmu oleh tenaga pendidik atau guru kepada peserta didik tentang ilmu-ilmu Islam dengan melalui proses, tahapan-tahapan dan metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi kegiatan pembelajaran.

Pendidikan Islam sesungguhnya telah ada sejak Allah Ta’ala selesai menciptakan manusia pertama Nabi Adam As yang akan menjadi khalifah di bumi ini, tetapi jika permulaannya terhitung sejak Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi Rasul dan pertama kali menerima wahyu, maka pendidikan Islam sesungguhnya dimulai sejak pertama kali Nabi Saw menerima wahyu pada tahun 611 M atau awal abad ke-7 yang substansinya adalah perintah untuk membaca dan belajar tentang kehidupan, seperti dituliskan dalam al-Qur’an surat al-‘Alaq (96): 1-5:

قْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

*Artinya; “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak ia ketahuinya”. (Q.S al-‘Alaq, (96):1-5)*

1. Implementasi akuntabilitas pendidikan dengan penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan manejemen sekolah terdapat relevansi ketika pemerintah menerapkan otonomi pendidikan yang ditandai dengan pemberian kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan manajemen sesuai dengan kekhasan, budaya dan kemampuan sekolah.

Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses pembelajaran, tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan dan kualitas output.

Adapun tujuan akuntabilitas pendidikan adalah:

* + - 1. Agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terdapat pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat
      2. Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya.
      3. Untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasaan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah.

1. Strategi peningkatan mutu pendidikan yang akuntabel mencakup tiga pola yaitu membangun kapasitas level birokrat, sekolah dan kelas.
   * + 1. Membangun kapasitas level birokrat berarti mengembangkan suasana kerja di kalangan staf dan pegawai kantor pendidikan di segala jenjang yang menekankan pada penciptaan kondisi kerja yang didasarkan pada saling percaya untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
       2. Membangun kapasitas  pada sekolah sebagai suatu sistem dan juga level kelas sebagai inti dari sekolah mencakup: *Pertama*, dalam membangun kapasitas sekolah individu memegang peranan penting. Individu dalam hal ini bisa kepala sekolah, guru ataupun siswa. *Kedua*, hubungan dan kaitan kerja diantara individu-individu yang dirangkum dalam suatu aturan sehingga mereka dapat bekerja sebagai suatu tim yang solid. *Ketiga*, terdapat suatu sistem dan mekanisme yang mendorong dan memfasilitasi terjadinya kesatuan kerja dan jaringan kerja internal yang akan meningkatkan kemampuan individu dan kualitas kerjasama. *Keempat*, keberadaan pemimpin yang mampu mengembangkan nilai-nilai, kultur, *trust*, keutuhan sosial dan kebersamaan yang tulus. Membangun kapasitas level sekolah mencakup; mengembangkan visi dan misi, mengembangkan kepemimpinan dan manajemen sekolah, mengembangkan kultur sekolah, mengembangkan *a learning school* yang melibatkan orang tua, alumni dan masyarakat serta memahami tantangan yang dihadapi.
       3. Membangun kapasitas sekolah harus diawali dengan membangun kapasitas kelas karena kapasitas kelas merupakan proses yang memungkinkan interaksi akademik antara guru dan siswa, dan antara komponen di sekolah yang berlangsung secara positif. Interaksi antar guru dan siswa merupakan inti dari kegiatan  di sekolah.
2. **Saran-saran**
   1. Kepada seluruh lembaga pendidikan -terutama lembaga pendidikan Islam- untuk menjadikan materi *akidah* *(tauhid),* keimanan dan *akhlak*  sebagai komponen utama dalam materi pembelajaran sebelum mengajarkan materi pelajaran lainnya dan menjadikan *al-Qur’an, as-Sunnah*, produk *ijtihad* para ulama dan *nidham hukumah* sebagai landasan dalam pelaksanaan pendidikan.
   2. Kepada seluruh penyelenggara pendidikan baik pendidikan negeri di bawah pemerintah maupun pendidikan swasta di bawah paguyuban atau yayasan harus berusaha:
3. Melakukan redesain sistem yang mampu menjawab tuntutan masyarakat dengan cara mengembangkan model manajemen pendidikan yang akuntabel, yaitu; mendesain dan menerapkan kurikulum yang relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau *stakeholders*, harus memiliki kemampuan manajemen handal, komitmen yang tinggi untuk mencapai kemajuan dan keunggulan, memiliki perangkat aturan yang jelas yang dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.
4. Merubah sistem pendidikan dan paradigma pembelajaran dengan mengutamakan dan mementingkan metodologi di atas materi, pikiran lateral di atas fertikal atau linier, kekuatan otak kanan di atas otak kiri, analisis dialog di atas memori, dan menjadi sesuatu di atas memiliki sesuatu.
5. Menanamkan nilai-nilai edukatif dan pemahaman arti dan tujuan hidup yang hakiki tidak sebatas mentransfer ilmu pengetahuan.
   1. Kepada seluruh *stakeholders;* elemen masyarakat, orang tua, pengusaha sebagai pengguna jasa pendidikan harus memiliki rasa tanggungjawab *(responsibility)* dan rasa memiliki *(sense of belonging)*  terhadap proses dan pelaksanaan pendidikan. Kontribusi yang positif, maksimal dan konstruktif akan dapat mendukung terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan hingga dapat mencapai tujuan *(goals)* yang diharapkan.